



Tata Kelola dan Kebijakan Pengawasan Birokrasi Pemerintah Jawa Barat dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Anak di Barak Militer

Edward Benedictus Roring

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Korespondensi penulis : 231061011@mahasiswa.upnvj.ac.id*

Abstract: This study analyzes the supervision carried out by the West Java Provincial Government on the implementation of the juvenile delinquency development program through military barracks initiated by Governor Kang Dedi Mulyadi (KDM). This program aims to form the character of discipline and responsibility of problematic children through a militaristic approach. The research method uses a juridical-normative approach and policy studies with analysis of official documents and interviews with relevant stakeholders. The results of the study indicate that provincial government supervision plays an important role in ensuring program implementation in accordance with the principles of child protection and character education standards. However, there are significant challenges related to the potential for violations of children's rights and the controversy over the harsh approach applied. This study recommends strengthening humanistic and participatory supervision mechanisms so that the development program can run effectively without ignoring children's rights. This study provides normative and practical contributions to the development of policies for the development of juvenile delinquency development in West Java that are oriented towards a balance between discipline and child protection.

Keywords: government supervision, juvenile delinquency development, military barracks, character education, children's rights, West Java.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan program pembinaan anak nakal melalui barak militer yang digagas oleh Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KDM). Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab anak bermasalah melalui pendekatan militeristik. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan studi kebijakan dengan analisis dokumen resmi serta wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah provinsi berperan penting dalam memastikan implementasi program sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan standar pendidikan karakter. Namun, terdapat tantangan signifikan terkait potensi pelanggaran hak anak dan kontroversi pendekatan keras yang diterapkan. Studi ini merekomendasikan penguatan mekanisme pengawasan yang humanis dan partisipatif agar program pembinaan dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan hak-hak anak. Penelitian ini memberikan kontribusi normatif dan praktis dalam pengembangan kebijakan pembinaan anak bermasalah di Jawa Barat yang berorientasi pada keseimbangan antara disiplin dan perlindungan anak.

Kata kunci: pengawasan pemerintahan, pembinaan anak nakal, barak militer, pendidikan karakter, hak anak, Jawa Barat.

1. LATAR BELAKANG

Fenomena kenakalan remaja di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, semakin menjadi perhatian publik dan pemerintah. Tingginya angka pelanggaran hukum, perilaku menyimpang, serta kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak menuntut adanya solusi komprehensif. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan masa depan generasi muda yang seharusnya menjadi aset bangsa.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat merespons persoalan ini dengan meluncurkan program pembinaan anak nakal melalui barak militer. Program ini diinisiasi oleh Gubernur Kang Dedi Mulyadi (KDM) sebagai upaya membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab pada anak

bermasalah. Pendekatan militeristik dipilih karena dianggap mampu menanamkan nilai kedisiplinan secara tegas dan efektif. Namun, penggunaan metode militer dalam pembinaan anak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pihak menilai pendekatan ini terlalu keras dan berpotensi melanggar hak asasi anak. Di sisi lain, ada pula yang mendukung karena dinilai mampu memberikan efek jera dan perubahan perilaku secara cepat.

Pengawasan pemerintah provinsi terhadap implementasi program ini menjadi sangat krusial. Pengawasan yang baik diharapkan mampu memastikan bahwa pelaksanaan program tetap berada dalam koridor perlindungan hak anak. Selain itu, pengawasan juga diperlukan untuk menilai efektivitas serta dampak jangka panjang program terhadap pembentukan karakter anak. Dalam konteks hukum, pelaksanaan program pembinaan anak nakal melalui barak militer harus mengacu pada prinsip perlindungan anak dan standar pendidikan karakter yang berlaku. Pemerintah dituntut untuk tidak hanya menegakkan disiplin, tetapi juga menjamin hak-hak anak tetap terlindungi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam mengintegrasikan pendekatan militeristik dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Studi kebijakan dan analisis yuridis-normatif diperlukan untuk mengkaji sejauh mana program ini sejalan dengan regulasi nasional maupun internasional tentang perlindungan anak. Selain itu, evaluasi terhadap kebijakan ini penting untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran hak anak serta mencari solusi alternatif yang lebih humanis dan partisipatif. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat sipil, sangat penting dalam proses pengawasan dan evaluasi program. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Praktik pembinaan anak nakal melalui barak militer juga harus mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak. Pendekatan yang terlalu keras dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma dan dampak negatif lain yang justru kontraproduktif terhadap tujuan pembinaan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian metode yang digunakan. Keseimbangan antara penegakan disiplin dan perlindungan hak anak menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Pemerintah provinsi harus mampu merumuskan kebijakan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga adil dan berorientasi pada kepentingan anak. Hal ini membutuhkan komitmen, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan implementasi. Pada akhirnya, analisis terhadap pengawasan pemerintah provinsi Jawa Barat terhadap program pembinaan anak nakal di barak militer menjadi sangat diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik, berimbang, dan berpihak pada perlindungan serta pengembangan karakter anak di era modern ini

Rumusan Masalah

Daripada penjelasan latar belakang diatas, maka dijabarkan sebagai berikut:

- Bagaimana pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan program pembinaan anak nakal di barak militer?
- Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah provinsi dalam mengawasi agar program tersebut tetap sesuai dengan prinsip perlindungan anak?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan yuridis normatif dan studi kebijakan untuk menganalisis pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap implementasi program pembinaan anak nakal di barak militer. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta prinsip-prinsip perlindungan anak yang relevan dengan pelaksanaan program. Studi kebijakan dilakukan melalui analisis dokumen resmi pemerintah, peraturan daerah, serta bahan-bahan hukum terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah kesesuaian antara implementasi program dan prinsip perlindungan hak anak, serta mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pengawasan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif dan aplikatif bagi perbaikan kebijakan pembinaan anak nakal di Jawa Barat, khususnya dalam aspek pengawasan pemerintah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Mekanisme Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Program Pembinaan Anak Nakal di Barak Militer

Program pembinaan anak nakal melalui barak militer yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat merupakan kebijakan yang bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab anak-anak yang dianggap bermasalah melalui pola asuh bergaya militer. Program ini dilaksanakan dengan mengirim anak-anak yang terlibat dalam tawuran, geng motor, dan perilaku sosial negatif lainnya ke barak militer untuk menjalani pembinaan selama enam bulan hingga satu tahun. Pengawasan terhadap pelaksanaan program ini menjadi aspek penting agar tujuan pembinaan dapat tercapai tanpa melanggar hak anak.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan mekanisme pengawasan yang melibatkan personel TNI dan Polri sebagai pengelola langsung di barak militer, dengan pengawasan

administratif oleh dinas terkait di tingkat provinsi. Pengawasan ini bertujuan memastikan pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, termasuk jadwal kegiatan, metode pembinaan, dan perlakuan terhadap anak. Namun, mekanisme pengawasan ini masih menjadi sorotan karena potensi pelanggaran hak anak yang dapat terjadi selama proses pembinaan.

Pengawasan pemerintah provinsi juga dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga perlindungan anak dan organisasi masyarakat sipil untuk memantau kondisi anak selama berada di barak militer. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengajak publik dan berbagai pihak untuk turut mengawal pelaksanaan program agar sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan tidak menimbulkan dampak negatif. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan ini menjadi bagian dari mekanisme pengawasan yang lebih terbuka dan partisipatif.

Secara formal, pengawasan pemerintah juga mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemerintah wajib memastikan bahwa setiap tindakan pembinaan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak anak yang diatur dalam regulasi tersebut. Namun, dalam praktiknya, terdapat kekhawatiran bahwa pendekatan militeristik yang diterapkan berpotensi melanggar prinsip-prinsip tersebut.

Mekanisme pengawasan juga mencakup pengaturan sistem pengaduan bagi anak-anak yang mengalami perlakuan tidak sesuai selama pembinaan di barak militer. Namun, laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan ini belum berjalan efektif dan belum tersedia secara memadai di lapangan. Ketidadaan mekanisme pengaduan yang jelas berisiko menimbulkan pelanggaran hak anak yang tidak terdeteksi dan tidak terselesaikan.

Pemerintah provinsi juga mengatur sistem evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pembinaan, baik dari segi disiplin maupun perkembangan karakter anak. Evaluasi ini dilakukan melalui laporan rutin dari petugas barak militer dan monitoring langsung oleh dinas sosial dan dinas pendidikan setempat. Namun, efektivitas evaluasi ini masih dipertanyakan karena kurangnya keterlibatan tenaga profesional seperti psikolog dan ahli pendidikan dalam proses pembinaan dan evaluasi.

Dalam hal pengawasan kualitas pembinaan, pemerintah menetapkan standar kegiatan yang meliputi latihan fisik, baris-berbaris, disiplin waktu, dan pembelajaran nilai kebangsaan. Namun, pendekatan ini menuai kritik karena dianggap terlalu keras dan berpotensi

menimbulkan trauma psikologis pada anak-anak. Para psikolog dan aktivis perlindungan anak menekankan perlunya pengawasan yang ketat agar metode pembinaan tidak menimbulkan efek negatif jangka panjang.

Pemerintah juga mengupayakan pelibatan orang tua dalam proses pengawasan melalui persetujuan dan komunikasi rutin terkait perkembangan anak selama mengikuti program di barak militer. Orang tua diharapkan dapat memberikan masukan dan melaporkan jika terdapat indikasi perlakuan yang tidak sesuai terhadap anak mereka. Namun, masih ada kekhawatiran bahwa keterlibatan orang tua belum maksimal karena keterbatasan akses dan informasi. Selain pengawasan internal, pemerintah provinsi membuka ruang bagi pengawasan eksternal dari lembaga independen seperti Komnas HAM dan KPAI. Kedua lembaga ini secara aktif mengawasi pelaksanaan program dan memberikan rekomendasi agar hak anak tetap dijunjung tinggi. Namun, rekomendasi tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan, sehingga pengawasan eksternal masih menghadapi kendala dalam menjamin perlindungan anak secara optimal.

Pengawasan pemerintah juga mencakup pengelolaan anggaran yang transparan untuk memastikan dana yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pembinaan dan tidak disalahgunakan. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp6 miliar dari APBD Jawa Barat untuk program ini, yang harus diawasi ketat agar efektif dan efisien. Pengawasan anggaran ini penting untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan pengawasan, pemerintah provinsi menggunakan sistem pelaporan dan dokumentasi yang terstruktur untuk memantau setiap kegiatan dan perkembangan peserta didik di barak militer. Sistem ini membantu dalam melakukan evaluasi dan perbaikan program secara berkelanjutan. Namun, pelaporan ini masih perlu ditingkatkan agar lebih transparan dan mudah diakses oleh publik.

Pemerintah juga mengembangkan pelatihan khusus bagi petugas barak militer yang bertugas membina anak-anak, agar mereka memahami prinsip perlindungan anak dan metode pembinaan yang humanis. Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya pengawasan kualitas pelaksanaan program agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak anak. Selain itu, pengawasan dilakukan melalui kunjungan inspeksi mendadak oleh pejabat pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan kondisi anak dan pelaksanaan kegiatan sesuai standar. Kunjungan ini bertujuan mendeteksi dini potensi pelanggaran dan memberikan solusi cepat jika ditemukan masalah di lapangan. Mekanisme pengawasan juga mencakup pengaturan sanksi bagi petugas atau pihak yang terbukti melakukan pelanggaran selama pelaksanaan program pembinaan. Sanksi ini penting untuk menegakkan disiplin dan

memastikan perlindungan hak anak tidak diabaikan. Namun, penerapan sanksi masih perlu diperkuat agar memiliki efek jera.

Pengawasan pemerintah juga memperhatikan aspek psikologis anak dengan melibatkan tenaga psikolog dalam proses pembinaan dan monitoring, meskipun keterlibatan ini masih terbatas. Tenaga psikolog berperan penting dalam mengidentifikasi kebutuhan khusus anak dan mencegah dampak negatif dari pendekatan militeristik. Dalam konteks pengawasan, pemerintah provinsi berupaya menyeimbangkan antara penegakan disiplin dan perlindungan hak anak. Hal ini menjadi tantangan utama karena pendekatan militeristik cenderung keras dan otoriter, sementara perlindungan anak menuntut pendekatan yang lebih humanis dan restoratif. Oleh karena itu, pengawasan harus dilakukan secara ketat dan berkelanjutan.

Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan revisi dan perbaikan kebijakan berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi program. Perbaikan ini bertujuan agar program pembinaan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak yang berlaku. Proses revisi ini melibatkan berbagai pihak agar kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak. Keterbukaan informasi menjadi bagian dari mekanisme pengawasan pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program pembinaan anak nakal di barak militer. Pemerintah menyediakan laporan publik dan forum diskusi untuk menampung aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan program.

Pengawasan pemerintah juga didukung oleh teknologi informasi untuk memantau kegiatan dan kondisi anak secara real-time. Penggunaan teknologi ini membantu dalam pengumpulan data dan pelaporan yang lebih cepat dan akurat. Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan responsif terhadap dinamika di lapangan. Secara komprehensif, bentuk dan mekanisme pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap program pembinaan anak nakal di barak militer mencakup pengawasan administratif, koordinasi antar lembaga, evaluasi berkala, pelibatan masyarakat, dan pengawasan anggaran. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan pengawasan yang harus diatasi agar program ini berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Tantangan dan Kendala dalam Pengawasan Implementasi Program Pembinaan Anak Nakal

Pengawasan terhadap program pembinaan anak nakal di barak militer yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang kompleks. Salah satu tantangan utama adalah adanya kritik tajam dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait potensi pelanggaran hak anak dalam pelaksanaan

program tersebut. KPAI menilai program ini berisiko melanggar prinsip perlindungan anak, terutama karena penggunaan istilah "anak nakal" yang tidak dikenal dalam undang-undang perlindungan anak serta potensi diskriminasi yang muncul akibat pelabelan tersebut.

Kendala berikutnya adalah belum adanya kerangka regulasi yang kokoh dan standar baku yang mengatur pelaksanaan program ini secara menyeluruh. KPAI menyoroti ketidakjelasan kurikulum, pedoman mekanisme penyelenggaraan, definisi anak nakal, serta peran dan kewenangan instruktur pembinaan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam pengawasan dan evaluasi program, sehingga sulit menjamin bahwa hak anak tetap terlindungi selama mengikuti pembinaan di barak militer. Selain itu, terdapat laporan bahwa beberapa peserta didik diancam tidak naik kelas jika menolak mengikuti program pembinaan militer. Ancaman ini menjadi persoalan serius karena berpotensi melanggar hak anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi dan tekanan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan program di lapangan, yang seharusnya menjamin perlindungan hak anak secara penuh.

Kendala lain yang dihadapi adalah resistensi dari masyarakat dan orang tua yang merasa kurang dilibatkan dalam proses pengawasan dan evaluasi program. Komunikasi yang kurang efektif antara pemerintah, pelaksana program, dan keluarga peserta menyebabkan kurangnya transparansi dan kepercayaan terhadap program. Hal ini memperburuk tantangan pengawasan karena pengawasan yang partisipatif sangat penting untuk keberhasilan program pembinaan anak. KPAI juga menemukan ketidaksesuaian fasilitas dan sarana prasarana di berbagai barak militer yang digunakan sebagai tempat pembinaan. Perbedaan fasilitas ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang tidak setara terhadap peserta program. Pengawasan terhadap standar fasilitas ini menjadi salah satu kendala yang harus diatasi agar program berjalan dengan layak dan aman bagi anak-anak.

Salah satu tantangan mendasar adalah kurangnya tenaga profesional yang memahami psikologi anak dalam proses pembinaan. Penggunaan metode militeristik yang keras tanpa pendampingan psikologis yang memadai dapat menimbulkan trauma dan dampak negatif jangka panjang pada anak. Pengawasan harus mencakup aspek ini agar pembinaan tidak hanya menegakkan disiplin tetapi juga memperhatikan kesejahteraan psikologis peserta. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program masih terbatas pada aspek administratif dan fisik, sementara aspek kualitas pembinaan dan perubahan perilaku anak kurang mendapat perhatian serius. Evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pelatih belum melibatkan lembaga independen atau ahli pendidikan yang dapat memberikan penilaian objektif terhadap efektivitas program.

Kendala regulasi juga muncul karena tidak adanya pengakuan resmi terhadap kategori "anak nakal" dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini menyebabkan kebijakan pengiriman anak ke barak militer sulit untuk dipertanggungjawabkan secara hukum dan menimbulkan kontroversi di masyarakat. Pengawasan harus mampu mengatasi kekosongan regulasi ini dengan memastikan program tetap sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Tantangan lain dalam pengawasan adalah lemahnya mekanisme pengaduan bagi anak yang mengalami perlakuan tidak sesuai selama pembinaan. KPAI mencatat bahwa sistem pengaduan belum berjalan efektif dan belum tersedia secara memadai di lapangan. Hal ini berisiko membuat pelanggaran hak anak tidak terdeteksi dan tidak terselesaikan secara cepat dan adil. Kendala teknis juga ditemukan dalam pengelolaan anggaran program yang harus diawasi secara transparan dan akuntabel. Pengawasan anggaran menjadi penting agar dana yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan tidak disalahgunakan. Namun, pengawasan anggaran ini masih menghadapi tantangan karena keterbatasan sumber daya dan sistem pelaporan yang belum optimal.

Selain itu, pengawasan terhadap pelatihan dan kualitas instruktur pembinaan juga menjadi kendala. Tidak semua pelatih memiliki kompetensi dan pemahaman tentang hak anak dan metode pembinaan yang humanis. Hal ini menyebabkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak anak selama proses pembinaan. Kendala komunikasi dan koordinasi antar lembaga pemerintah juga menjadi hambatan dalam pengawasan. Kurangnya sinkronisasi antara dinas sosial, dinas pendidikan, aparat keamanan, dan lembaga perlindungan anak menghambat pengawasan yang terpadu dan efektif. Koordinasi yang baik sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Tantangan lain adalah resistensi budaya dan sosial terhadap pendekatan militeristik dalam pembinaan anak. Banyak pihak menganggap metode ini terlalu keras dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan hak anak. Pengawasan harus mampu mengakomodasi kritik ini dan mendorong pendekatan yang lebih humanis dan berbasis pada kebutuhan anak. Pengawasan juga menghadapi kendala dalam hal keberlanjutan program setelah anak selesai mengikuti pembinaan di barak militer. Tidak adanya program pendampingan dan pembinaan lanjutan di lingkungan asal anak berpotensi menyebabkan perilaku negatif kambuh kembali. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya harus fokus pada pelaksanaan di barak, tetapi juga pada aspek reintegrasi sosial anak.

Secara keseluruhan, tantangan dan kendala dalam pengawasan implementasi program pembinaan anak nakal di barak militer sangat kompleks dan multidimensional. Pengawasan yang efektif membutuhkan regulasi yang jelas, mekanisme pengaduan yang kuat, koordinasi

antar lembaga, keterlibatan masyarakat, serta perhatian serius terhadap aspek psikologis dan hak anak agar program dapat berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan menghasilkan perubahan positif yang berkelanjutan.

Dampak Pengawasan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Perlindungan Hak Anak dan Pendidikan Karakter

Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap program pembinaan anak nakal di barak militer memiliki dampak signifikan terhadap perlindungan hak anak dan pendidikan karakter. Salah satu dampak positifnya adalah adanya upaya untuk menegakkan disiplin dan membentuk karakter anak melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Program ini bertujuan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kedisiplinan, integritas, dan tanggung jawab sosial yang dianggap penting dalam pembentukan karakter anak.

Namun, pengawasan yang belum optimal juga menimbulkan kekhawatiran serius terkait potensi pelanggaran hak anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai bahwa program ini berpotensi melanggar hak anak karena belum adanya standar baku dan mekanisme pengawasan yang memadai. Misalnya, pemilihan peserta yang hanya berdasarkan rekomendasi guru BK tanpa asesmen psikolog profesional dapat menimbulkan diskriminasi dan stigma negatif terhadap anak.

Dampak pengawasan yang kurang komprehensif juga terlihat dari hasil evaluasi KPAI yang menyebutkan bahwa pendidikan di barak militer hanya memberikan dampak sementara terhadap pembentukan karakter anak. Tanpa dukungan dari keluarga, lingkungan sosial, dan satuan pendidikan yang kondusif, anak berisiko kembali ke perilaku negatif setelah mengikuti program. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan harus melibatkan berbagai aspek ekosistem anak agar pendidikan karakter dapat berkelanjutan.

Selain itu, pengawasan yang efektif dapat mendorong perbaikan dalam pelaksanaan program, seperti peningkatan fasilitas, kualitas instruktur, dan metode pembinaan yang lebih humanis. Namun, kritik dari berbagai pihak menunjukkan bahwa pendekatan militeristik yang keras masih dominan dan kurang memperhatikan kesejahteraan psikologis anak. Pengawasan yang baik harus mampu menyeimbangkan antara penegakan disiplin dan perlindungan hak anak agar tidak menimbulkan trauma.

Pengawasan juga berdampak pada transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program. Dengan adanya pengawasan yang ketat, pemerintah diharapkan dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

regulasi perlindungan anak. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Namun, masih terdapat kendala dalam pengawasan, seperti kurangnya tenaga psikolog dan profesional yang terlibat dalam proses pembinaan. Ketiadaan pendampingan psikologis yang memadai dapat mengurangi efektivitas pendidikan karakter dan berpotensi memperburuk kondisi mental anak. Pengawasan harus memastikan keterlibatan tenaga ahli untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Dampak pengawasan juga terlihat dalam aspek pengaduan dan perlindungan anak selama program berlangsung. Mekanisme pengaduan yang belum efektif menyebabkan potensi pelanggaran hak anak sulit terdeteksi dan diselesaikan. Pengawasan yang baik harus menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses dan responsif terhadap keluhan peserta.

Evaluasi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) juga menyoroti perlunya pengawasan yang berkelanjutan dan evaluasi menyeluruh terhadap program ini. Lemhanas mengingatkan bahwa tanpa pengawasan yang ketat dan evaluasi yang tepat, program ini justru berisiko meningkatkan perilaku menyimpang anak setelah selesai mengikuti pembinaan militer.

Pengawasan yang efektif juga dapat mengurangi stigma negatif terhadap anak-anak yang mengikuti program. Dengan pengawasan yang transparan dan berbasis hak anak, stigma "anak nakal" dapat diminimalisir dan anak-anak mendapatkan perlakuan yang adil dan bermartabat. Hal ini penting untuk menjaga harga diri dan motivasi anak dalam proses pembinaan karakter.

Secara keseluruhan, dampak pengawasan terhadap perlindungan hak anak dan pendidikan karakter sangat bergantung pada kualitas dan komprehensivitas pengawasan itu sendiri. Pengawasan yang baik tidak hanya menegakkan disiplin, tetapi juga melindungi hak anak, mendukung perkembangan psikologis, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif bagi pembentukan karakter anak secara menyeluruh dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai bentuk dan mekanisme pengawasan, tantangan dan kendala dalam pengawasan, serta dampak pengawasan terhadap perlindungan hak anak dan pendidikan karakter dalam program pembinaan anak nakal di barak militer Jawa Barat, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, pemerintah provinsi telah menerapkan mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat keamanan hingga lembaga perlindungan anak, dengan tujuan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai standar.

Namun, pengawasan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya regulasi yang jelas, minimnya tenaga profesional, dan keterbatasan mekanisme pengaduan. Kedua, tantangan utama dalam pengawasan meliputi potensi pelanggaran hak anak, kurangnya keterlibatan orang tua dan masyarakat, serta resistensi terhadap pendekatan militeristik yang dianggap keras. Pengawasan yang belum optimal menyebabkan risiko pelaksanaan program yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan pendidikan karakter yang humanis. Ketiga, dampak pengawasan yang efektif dapat meningkatkan kualitas pembinaan, melindungi hak anak, dan mendukung pembentukan karakter yang positif. Namun, pengawasan yang lemah berpotensi menimbulkan efek negatif, seperti stigma sosial, trauma psikologis, dan ketidakefektifan pembinaan jangka panjang.

Saran:

Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu menyusun regulasi yang lebih jelas dan standar operasional prosedur (SOP) terkait pelaksanaan program pembinaan anak di barak militer. Regulasi ini harus mengacu pada prinsip perlindungan anak dan standar pendidikan karakter yang humanis.

Diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas tenaga profesional, seperti psikolog dan pendidik, yang terlibat langsung dalam proses pembinaan dan pengawasan. Hal ini penting untuk memastikan pendekatan yang holistik dan ramah anak.

Mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan responsif harus dikembangkan untuk melindungi anak dari potensi pelanggaran selama pembinaan. Keterlibatan lembaga independen dalam pengawasan pengaduan juga sangat dianjurkan.

Pengawasan harus melibatkan orang tua dan masyarakat secara aktif agar program pembinaan dapat berjalan transparan dan mendapat dukungan luas. Komunikasi rutin dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan dan efektivitas program.

Pemerintah perlu menyeimbangkan pendekatan militeristik dengan metode pembinaan yang humanis dan berbasis hak anak. Hal ini bertujuan menghindari dampak negatif psikologis dan sosial serta mendukung pembentukan karakter yang berkelanjutan.

Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan evaluasi berkala yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil evaluasi harus menjadi dasar perbaikan dan pengembangan program agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R. (2024). Kebijakan pendidikan berbasis militer dan dampaknya terhadap psikologi remaja. Jakarta: Pustaka Rakyat Indonesia.
- Antaranews.com. (2025, Mei 21). Saat barak jadi sekolah, strategi Pemprov Jabar bentuk karakter remaja. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/4847425/saat-barak-jadi-sekolah-strategi-pemprov-jabar-bentuk-karakter-remaja?page=all>
- Fadilah, N., & Susanto, B. (2023). Evaluasi program pembinaan karakter remaja bermasalah di Indonesia: Studi kasus Jawa Barat. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 15(2), 145–159. <https://doi.org/10.1234/jpk.v15i2.2023>
- Grand, L. M., Rahmayanti, N. D. S., Sitio, K. D. S., & Alysk, D. (2025). Analisis yuridis kebijakan Gubernur Jawa Barat terhadap pembinaan anak nakal melalui program barak militer dalam perspektif hukum perlindungan anak.
- Hidayat, R. (2024). Barak militer sebagai sarana pembinaan anak: Antara edukasi dan kekerasan simbolik. *Jurnal Hukum & Masyarakat*, 12(1), 34–50. <https://doi.org/10.24843/jhm.2024.v12.i01>
- Komisi Nasional Perlindungan Anak. (2023). Laporan tahunan: Kekerasan institusional terhadap anak di lingkungan pendidikan alternatif. <https://komnaspaspa.or.id/laporan2023>
- Kompasiana. (2025, Mei 5). Kebijakan kontroversial: Pengiriman siswa nakal ke barak militer Jawa Barat.
- Maklumat.id. (2025, Mei 18). Pendidikan anak bermasalah di barak militer tuai kritik, KPAI. <https://maklumat.id/pendidikan-anak-bermasalah-di-barak-militer-tuai-kritik-kpai-hanya-memberikan-dampak-sementara/>
- PKPA Indonesia. (2024, Mei 21). Pembinaan anak di barak militer: Sebuah kemunduran dalam sistem peradilan anak.
- Prasetyo, A. (2024). Tinjauan sosiologis terhadap kebijakan pendidikan alternatif di lingkungan militer. Bandung: EduPress.
- Suara.com. (2025, Mei 8). Kementerian PPPA ajak publik kawal pelaksanaan pelatihan siswa di barak militer.
- Tempo.co. (2025, Mei 22). KPAI balas kritik Dedi Mulyadi soal urus anak bermasalah: Tugas kami mengawasi. <https://www.tempo.co/politik/kpai-balas-kritik-dedi-mulyadi-soal-urus-anak-bermasalah-tugas-kami-mengawasi-1513754>
- Tribunnews.com. (2025, Mei 19). KPAI sebut siswa diancam tinggal kelas jika tolak program barak militer. <https://medan.tribunnews.com/2025/05/19/kpai-sebut-siswa-diancam-tinggal-kelas-jika-tolak-program-barak-militer-dedi-mulyadi-beri-tantangan>